



5 Tahun Chui Mie Tunjugu WTP

Terganjal Aset Pasca Pemekaran

SINGKAWANG, TRIBUN - Penyelesaian dokumen aset dan data penyertaan bantuan modal bergulir 2003, menjadi ganjalan administrasi Kota Singkawang untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Syech Bandar mengatakan pihaknya sedang berupaya untuk memperbaiki administrasi, terkait dua hal itu. "Kita sudah melakukan upaya-upaya. Harapannya kita memang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian," katanya saat menutup Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Kalbar, di Hotel Dangau, Kamis (6/5).

Bandar menjelaskan, untuk masalah aset pasca pemekaran, BPK sudah memfasilitasi penyelesaiannya. Ada 162 aset yang akan diserahkan berjenjang dari Kabupaten Bengkayang dan diserahkan ke Kota Singkawang.

"Itu dampak pemekaran.

Terutama pembagian harta gono-gini itu, di seluruh Indonesia memang menjadi masalah," katanya.

Inspektor Kota Singkawang,

Siti Kodam mengatakan, masalah aset yang menjadi temuan BPK pada LKPJ 2012 terlebih

itu dampak pemekaran. Terutama pembagian harta gono-gini itu, di seluruh Indonesia memang menjadi masalah. □

SYECH BANDAR

Sekretaris Daerah Kota Singkawang

Kodam mengatakan, pihaknya berupaya untuk menegakkan peraturan yang ada dikendalikan.

Persoalan kedua yang membuat Singkawang belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian, adalah penyertaan modal bergulir yang pernah diberikan Pemko Singkawang dalam bentuk bantuan modal kepada petani, nelayan dan UKM. Total penyertaan modal yang diberikan bermula Rp 1 miliar lebih. "Itu merupakan temuan sejak 2009. Sekarang kita himpung datanya. Kita berupaya menelusuri. Pelan-pelan kita dekat bisa dapat," jurnanya.

Kodam menegaskan, meski hingga 2012 masih terdapat teman, pihaknya terus berupaya agar berkutang. Untuk LKPJ 2013 yang saat ini masih diaudit BPK, dirinya berharap laporan itu mendapat opini WTP. "Kita sudah berupaya menyelaikan temuan-temuan yang awalnya banyak menjadi sedikit. Harapan kita memang semoga mendapat predikat WTP," katanya.

Sebagai instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan,

kil rakyat, pihaknya memang berharap mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Predikat tersebut, menurutnya akan menjadi prestasi baik bagi Singkawang. "Tidak hanya lokal, tapi juga prestasi nasional. Tapi hampir lima tahun saya menjalankan ketua DPRD kita tidak pernah mendapatkannya," kata Chui Mie kepada Tribun.

Menurutnya, penyebab paling besar Singkawang tidak bisa meraih WTP dikarenakan persoalan aset. Meski 162 asset sudah dikelot Pulu, namun hingga sekarang dokumennya belum juga diserahkan.

"Jadi tak akan pernah bisa, selagi masalah asset ini tidak selesai. Kita sudah berkuat-kali mengadakan pertemuan, na-

mun secara administrasi belum diserahkan," katanya. Selain tertib administrasi, pihaknya juga berharap eksekutif bisa tertib dalam penyelesaian anggaran. Pengguna anggaran, menurutnya, harus tahu dengan aturan yang ada agar tidak terjerat kasus hukum.

"Saya melihat mereka yang terjerat persoalan hukum terkait anggaran, lebih cenderung karena ada aturan yang tidak mereka pahami. Kalau sudah tahu pemakaian dan sesuai aturan, tidak akanjadi temuan dan tersangka," katanya. Ketua DPRD berharap sosialisasi dan pemahaman untuk pengguna anggaran agar mengerti aturan yang ada. Pihaknya sendiri, selalu mengingatkan hal itu. (dum)

Dampak Positif

WARGA Kelurahan Roban, M Deni Isnaeni, mengatakan, sebagai warga dirinya tidak begitu faham dengan predikat WTP. Namun dan pemberitaan media massa, predikat itu merupakan hal penting. "Sejatiknya orang merupakai hal baik. Terdiri dalam administrasi. Jadi kesannya tidak berantakan," paparnya. Deni mengatakan, yang lebih penting lagi adalah anggaran yang dikeluarkan pemerintah benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya di atas kertas, tapi juga pertanggungjawaban ke masyarakat. "Artinya benar-benar dirasakan man-

faatnya. Jadi pemerintah tidak sembarangan mengeluarkan uang. Semua harus berminat untuk jangka panjang," katanya.

Warga Singkawang Sejati, Yani, mengatakan, predikat WTP mutlak dibutuhkan karena selama ini orang mengenal Wali Kota sebagai ahli administrasi pemerintahan. Dirinya sendiri juga pernah membaca pada satu media, bahwa Wali Kota merupakan ulusan sekolah administrasi pemerintahan. "Jadi mungkin dengan dapat predikat itu, terbukti Wali Kota ahli mengurus negara. Masa kita kalah dengan Kota Pontianak," katanya. (dum)